

ABSTRAK

HADI SUHENDRA

Perkembangan penggunaan karya seni sebagai identitas komersial, terutama logo sebagai merek dagang, menimbulkan persoalan terkait batas perlindungan antara Hak Cipta dan Merek. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa logo merupakan ciptaan yang dilindungi dan otomatis memperoleh perlindungan berdasarkan prinsip deklaratif. Namun, konflik muncul ketika karya seni yang menjadi objek Hak Cipta didaftarkan sebagai merek oleh pihak lain tanpa izin penciptanya. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memerlukan penafsiran yuridis yang lebih tegas, sebagaimana tergambar dalam Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst terkait klaim sepihak atas karya seni komersial.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, doktrin, dan putusan terkait. Analisis kualitatif digunakan untuk menelaah hubungan antara prinsip deklaratif UU Hak Cipta, pendaftaran merek, serta jaminan perlindungan hukum bagi pencipta karya seni.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karya seni yang orisinal memperoleh perlindungan otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 65 UU Hak Cipta, sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai merek oleh pihak selain penciptanya. Dalam perkara Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-HakCipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, majelis hakim menilai bahwa Tergugat tidak memiliki hak untuk mendaftarkan karya seni tersebut sebagai merek karena bukan pencipta dan tidak memperoleh izin dari Penggugat. Oleh sebab itu, pendaftaran merek oleh Tergugat dinyatakan cacat hukum. Pembatalan sertifikat merek dan pemulihan hak kepada Penggugat merupakan putusan yang menegaskan supremasi perlindungan Hak Cipta atas karya seni serta pentingnya kepastian hukum dalam mencegah penyalahgunaan pendaftaran merek.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan karya seni sebagai objek Hak Cipta berlaku otomatis dan harus dihormati dalam setiap proses pendaftaran merek. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu meningkatkan ketelitian dalam memverifikasi permohonan pendaftaran merek agar tidak terjadi klaim sepihak yang merugikan pencipta. Masyarakat juga diharapkan lebih menghargai karya cipta orang lain dengan tidak melakukan pengambilalihan karya demi kepentingan komersial.

Kata Kunci: Analisis Putusan, Karya Seni, Hak Cipta

ABSTRACT

HADI SUHENDRA

The development of using artworks as commercial identities, particularly logos as trademarks, raises issues regarding the boundaries of protection between Copyright and Trademark Law. Indonesia's Copyright Law No. 28 of 2014 affirms that logos are protected works and automatically obtain protection under the declarative principle. However, conflicts arise when artworks protected by copyright are registered as trademarks by other parties without the creator's consent. This situation creates legal uncertainty and requires clearer juridical interpretation, as reflected in Decision No. 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst concerning unilateral claims over commercially used artworks.

This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach through library research on relevant legislation, legal doctrines, and court decisions. A qualitative analysis is used to examine the relationship between the declarative principle in the Copyright Law, trademark registration, and legal protection guaranteed to creators of artistic works.

The study finds that original artworks automatically receive protection under the declarative principle as stipulated in Article 1 point 1 and Article 65 of the Copyright Law, and therefore cannot be registered as trademarks by parties other than the creator. In Decision No. 40/Pdt.Sus-HakCipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, the judges concluded that the defendant had no legal basis to register the artwork as a trademark because they were not the creator and had obtained no consent from the plaintiff. Consequently, the defendant's trademark registration was deemed legally defective. The cancellation of the trademark certificate and the restoration of rights to the plaintiff affirm the supremacy of copyright protection over artworks and highlight the importance of legal certainty in preventing misuse of trademark registration.

This research concludes that protection of artworks as copyright objects applies automatically and must be respected in all trademark registration processes. The Directorate General of Intellectual Property should enhance its scrutiny when examining trademark applications to prevent unilateral claims detrimental to creators. The public is also encouraged to respect the works of others and refrain from appropriating them for commercial gain.

Keywords: Judicial Analysis, Artwork, Copyright